



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1128>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 404-418

Research Article

Otoritas Keagamaan Bagi Perempuan IMM; Studi Fenomenologi di Tarakan

Nur Hanida¹, Purwidiyanto²

1. Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka; Amidaamida82@gmail.com 
2. Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka; purwidiyanto@uhamka.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 15, 2024
Accepted : May 07, 2024

Revised : April 12, 2024
Available online : July 10, 2024

How to Cite: Nur Hanida and Purwidiyanto (2024) "Female Religious Authority in IMM; Phenomenological Study in Tarakan", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 404-418. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1125.

Female Religious Authority in IMM; Phenomenological Study in Tarakan

Abstract. This journal discusses religious authority for women in IMM. The phenomenon where in a religious group or organization still has the idea that women are not worthy or inappropriate to be dreamers or lead a religious activity even in ordinary people still think that women are only housewives who take care of their husbands, children and homes. This is a picture of the tradition of Islamic thought that is still rigid and undeveloped, thus impacting the social behavior of the immoderate community. so that this journal will discuss religious authority for women, especially in the Muhammadiyah Student Association as a forum for educating Islam-based student cadres and also has a special field regarding women or known as the IMMAWATI field, Therefore, it is interesting to know how religious authority for women in IMM, whether there is still a gender gap between men and

women, and what are the problems experienced in applying authority in religion for women in IMM. The method used in this study is a qualitative method where this method is carried out by interviewing IMM members who have been active in IMM organizations as data that will be used as a reference to find out how religious authority for women in IMM.

Keywords: Authority, Women, Religious, IMM

Abstrak. Jurnal Ini membahas mengenai otoritas keagamaan bagi perempuan didalam IMM. Fenomena dimana didalam sebuah kelompok atau organisasi keagamaan masih saja memiliki pemikiran bahwasanya perempuan tidak layak atau tidak pantas untuk menjadi pemimpin atau memimpin suatu kegiatan keagamaan bahkan dimasyarakat awampun masih beranggapan bahwasannya perempuan kodratnya hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus suami, anak dan rumahnya saja. Hal ini menjadi gambaran tradisi pemikiran islam yang masih kaku dan tidak berkembang, sehingga berdampak terhadap perilaku social masyarakat yang tidak moderat. sehingga dalam jurnal ini akan membahas mengenai otoritas keagamaan bagi perempuan lebih khususnya didalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai wadah mendidik kader mahasiswa yang berbasis islam dan juga memiliki bidang khusus mengenai perempuan atau yang dikenal dengan bidang IMMAWATI, oleh sebab itu hal ini menjadi menarik untuk kita ketahui bagaimana otoritas keagamaan bagi perempuan di dalam IMM apakah masih ada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan serta apasaja problem yang dialami dalam menerapkan keotoritasan dalam keagamaan bagi perempuan di dalam IMM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang mana metode ini dilakukan dengan cara wawancara dengan anggota IMM yang pernah aktif dalam organisasi IMM sebagai data yang akan dijadikan acuan untuk mengetahui bagaimana otoritas keagamaan bagi perempuan didalam IMM.

Kata Kunci: Otoritas , Perempuan , Keagamaan , IMM

PENDAHULUAN

Perempuan selalu menarik untuk diperbincangkan, mulai dari wilayah privat sampai ruang sosial. Pada wilayah privat, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang taat karena eksistensi dan perilaku kesehariannya ditentukan oleh orang lain, seperti bapak, suami dan keluarga lainnya. Begitu juga pada wilayah sosial, perempuan dianggap sebagai makhluk yang membawa bencana, karena perilaku perempuan diatur dengan kesepakatan kaum laki-laki, seperti harus menjaga penampilan. Secara umum, tafsir tentang perempuan dalam dunia privat dan sosial ditentukan oleh kesepakatan budaya dan dogma agama.¹

Hegemoni budaya dan agama dalam mendeskripsikan perempuan sebagai makhluk lemah juga berkembang di wilayah pesantren. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa bahan kajian yang diajarkan, seperti kitab „Uqud al-Lujain, Tafsir Jalalain, Tijanun al-Dararidan beberapa kitab fiqh serta kitab akhlaq. Salah satu alasan atau faktor yang menyebabkan munculnya paham diskriminasi perempuan ialah adanya anggapan secara teologi bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki

¹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Agama Dalam Pemikiran Barat Modern dan Post-Modern*, 1 ed., vol. 4, (Jakarta: ISLAMIA, 2005).

dan anggapan tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat serta diyakini sebagai ajaran agama yang harus dipatuhi.²

Menurut Nasaruddin yang dikutip Muhtador bahwa ketika mitologi dituangkan dalam bahasa agama pengaruhnya akan bertambah kuat. Hal tersebut disebabkan oleh keyakinan bahwa kitab suci bukanlah sekedar mitologi, tetapi bersumber dari Tuhan. Bahkan berbagai mitologi telah terintegrasi dalam tradisi keagamaan dan termanifestasikan dalam berbagai bentuk kepercayaan.

Tiga tipologi pola pada kajian sebelumnya meliputi hegemoni patriaki, kritik dan kontribusi perempuan, sehingga perlu dipertanyakan beberapa hal tentang otoritas perempuan di hadapan masyarakat pesantren dan sekitarnya, yaitu bagaimana hubungan budaya dan agama dalam mengkonstruksi perempuan. Pada wilayah yang sama juga akan ditanyakan otoritas keagamaan apa saja yang dapat dimainkan oleh kalangan perempuan di pesantren..³

Otoritas yang diperoleh oleh seorang kyai dari masyarakat pada dasarnya bagian dari kepercayaan yang menumbuhkan kharisma dan memantapkan posisi kyai sebagai agent of knowledge (agen pengetahuan) dan agent of social (agen sosial). Pada wilayah ini, seorang kyai telah diyakini oleh masyarakat telah memperoleh kematang spiritual untuk memimpin pesantren dan menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban Islam, sehingga pesantren tidak hanya dipandang sebagai tempat yang hanya mendalami ilmu agama semata, karena di pesantren para santri juga diajarkan berbagai hal masalah kehidupan, seperti kemasyarakatan, ilmu batin dan lain sebagainya. Realita tersebut menandakan adanya hubungan kuat antarsantri dengan seorang kyai, sehingga tidak mengejutkan ketika pesantren mempunyai relasi yang lebih luas. Menurut Adian ada banyak faktor yang menyebabkan luasnya peran dan otoritas seorang kyai yaitu, pertama, relasi geneologi, relasi yang didapatkan melalui hubungan biologis-apakah secara langsung atau disebabkan pernikahan yang dianggap mampu menggantikan dan meneruskan perjuangan seorang ayah. Kedua, relasi ideologi, relasi ini dibangun karena adanya kesamaan tujuan dan sintemen keagamaan maupun golongan.⁴

Ketiga, relasi intelektual, yang diikat dengan rasa emosional seorang guru pada muridnya. Keempat, relasi teologis, relasi ini tidak berbeda jauh dengan relasi ideologis, tetapi yang membedakan keduanya ialah sintemen teologi yang tertanama, seperti teologi Asy'ariah yang banyak tersebar di Jawa. Kelima, relasi spiritual, relasi yang dikonstruksi dari kesamaan paham tarekat yang diikuti.⁵

Independensi pesantren sebagai pendidikan agama membuka keyakinan masyarakat bahwa pesantren adalah tempat ideal untuk mencari ilmu agama, keyakinan tersebut didukung dengan kharismatik yang dimiliki oleh seorang kyai dalam berperilaku dan ketika menyampaikan ilmu agama. Pada wilayah yang sama,

² Wan Mohd Nor Wan Daud, *Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini* (Malaysia: Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur, 1997), 5.

³ Adian Husaini, *Mengapa Barat Menjadi Sekuler-Liberal* (Ponorogo: CIOS, 2007).

⁴ Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.

⁵ Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

keyakinan tersebut berangkat dari asumsi dasar yaitu berkah. Kalangan santri memaknainya sebagai bertambahnya kabaikan dalam hidup. Makna ini mempunyai ikatan emosional dibandingkan dengan rasional, karena kepatuhan santri pada kyai meliputi berbagai bidang yang tidak dapat dirasionalkan. Kepatuhan tersebut tidak hanya berlaku pada seorang kyai, tetapi juga pada istri kyai (nyai). Pada wilayah ini, nyai mempunyai peran signifikan dalam kehidupan dipesantren, karena berdasar konsepsi budaya nyai mewakili seorang kyai dalam mengurus santri putri dan pada konteks eksternal ibu nyai terkadang mengurus dan mengisi pengajian di masyarakat umum⁶

Agama dan Budaya: Jalan Terjal bagi Kebebasan Perempuan Perkembangan ajaran agama pada dasarnya adalah anak dari zamannya karena setiap ajaran agama merupakan wajah dari peradaban yang berkembang di suatu wilayah, seperti al Quran dan Hadis. Kedua sumber agama Islam tersebut tidak bisa dipandang sebagai ajaran murni yang tidak bergelut dengan masanya, atau menilai keduanya hanya bersifat normative tanpa aspek histori. Anggapan dan penilai tersebut sama halnya menghilangkan sejarah agama dan nilai peradaban manusia. Menurut Amin Abdullah, agama memiliki dua wilayah yang harus diperhatikan yaitu normativitas dan historisitas. Kedua wilayah ini ibarat dua koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan namun bisa dibedakan. Pada wilayah pertama, seseorang dituntut untuk meyakini ajaran agama sebagai pedoman yang tidak dapat dikritisi, karena wilayah ini bagian dari prerogatif Tuhan. Pada wilayah kedua, agama hadir sebagai respon dari problematika masyarakat, sehingga ada jalinan relasional antara ajaran agama dengan kehidupan masyarakat.

Sejarah agama tidak bisa berdiri sendiri, dan bahkan agama juga bersandingan dengan budaya patriarki, seperti beberapa sumber normatif yang menarasikan perempuan berbeda dengan laki-laki. Pada wilayah yang sama, kebijakan atau putusan keagamaan banyak diperankan oleh kaum laki-laki, sehingga secara teologis maupun sosiologis budaya patriarki memiliki pengaruh kuat dalam menarasikan pesan agama. Pada wilayah teologis, ontologi perempuan dinarasikan sebagai makhluk ciptaan nomor dua, yaitu perempuan tercipta dari tulang rusuk kiri laki-laki. Anggapan tersebut tidak secara tegas terdapat dalam al-Qur'an, tetapi berangkat dari hadis Nabi dan mitologi agama-agama dan harus dipahami lebih dalam menilainya.⁷

Berkembangnya mitologi pada wilayah sosial memberikan dampak buruk terhadap kehidupan perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai makhluk terlarang di wilayah publik. Anggapan tersebut adalah bentuk politik patriarki yang diyakini oleh perempuan sebagai takdir yang harus dijalani. Jalinan kuat antara agama dan budaya patriarki telah menemukan formasi ideal untuk mempertahankan dominasi laki-laki, karena mitologi sudah menjadi ajaran yang datang dari Tuhan

⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu* (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972).

⁷ Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).

⁸Dengan bahasa yang mudah ialah bahwa budaya patriarki berkembang dan berdiri sejajar dengan pemahaman tentang anggapan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga. Menurut Qasim Amin berpendapat, bahwa perempuan kehilangan kebebasannya setelah berkeluarga. Hal itu terjadi di berbagai daerah sebelum Islam datang, yakni Yunani, Roma, Jerman, India, Cina, dan Arab

Definisi

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi otonom muhammadiyah yang bergerak untuk menghimpun kader muhammadiyah dari kalangan mahasiswa. IMM bergerak dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan, tujuan dari IMM ialah mengusahakan terbentuknya akademisi islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.⁹ IMM hampir ada di setiap universitas ataupun sekolah tinggi Muhammadiyah di setiap daerah di Indonesia sehingga anggota ataupun ruang lingkup IMM juga sangat luas. IMM juga memiliki struktur kepemimpinan yang sangat terorganisir dengan baik seperti adanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah tingkat tertinggi dan berkedudukan di Ibu kota Negara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah tingkatan yang mencakup sejumlah cabang dalam suatu Provinsi, Pimpinan Cabang (PC) adalah tingkatan yang mencakup sejumlah komisariat dalam suatu kabupaten, Komisariat adalah tingkatan dasar yang berada pada suatu kampus, fakultas ataupun akademik tertentu. Dengan adanya struktur kepemimpinan yang seperti ini sehingga tujuan utama dari IMM akan terus terpantau di setiap tingkatannya. Dalam IMM memiliki susunan bidang organisasi salah satu ialah adanya bidang IMMawati yang mana bidang ini berfokus untuk mengoptimalkan peran immawati (perempuan) dalam upaya peningkatan kualitas diri serta berperan dalam berbagai aspek baik dalam bidang ikatan maupun diluar agar bisa terus mengawal budaya adil gender untuk diterapkan.

Khaled M. Abou el-Fadl tidak menjelaskan terlebih dahulu apa makna “otoritas” yang tentu menjadi akar kata dari otoritarianisme. Dalam karyanya ada beberapa istilah yang mirip, seperti otoritatif, dan “otoriter”. Namun, apa yang dikehendaki oleh Khaled segera dapat dipahami dari pembagiannya terhadap otoritas, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum.¹⁰ Sementara otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.

⁸ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, “The Essence of ‘Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education,” *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

⁹ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New York: Dodo Press, 2009).

¹⁰ Amgad S. D. Khaled, Najat Shakir Mahmood, dan Fozi Ali Belhaj, “Islamic Human Resource Management in Gulf Countries: A Literature Review,” *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS* 20 (28 Februari 2023): 514–25, <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.47>.

Sehingga berbeda antara “memangku otoritas” (being in authority) dan “memegang otoritas” (being an authority), sebagaimana dalam terminologi Friedman. “Memangku otoritas” artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberikan kekuasaan untuk mengeluarkan perintah atau arahan. Sementara menaati “pemegang otoritas” adalah dengan cara menanggalkan pendapat pribadi karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang mempunyai pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik. Sehingga, seperti yang diungkapkan Friedman, pengetahuan khusus semacam itulah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Tunduk kepada seseorang yang memegang otoritas melibatkan apa yang disebut oleh Friedman sebagai “praduga epistemologis” (epistemological presupposition) ¹¹

Otoritas dan Otoritarianisme memiliki batasan untuk selalu menempatkan otoritas pada tempatnya. Dalam arti bahwa wakil Tuhan bukanlah Tuhan, dan wakil otoritas bukanlah otoritas itu sendiri. Seorang yang dianggap otoritatif bukan lantas menjadi sumber kebenaran, ia hanyalah pihak yang memegang otoritas dalam koridor koersif maupun persuasif. Melalui prasyarat moral ini Khaled hendak menetapkan sebuah dasar dari sikap yang ia sebut sebagai “otoritarianisme”. Istilah ini tidak diturunkan melalui istilah “otoritas” secara langsung. Ia lebih dekat dengan istilah sepadan lainnya yaitu “otoriter”. Dengan kata lain, jika otoritas adalah wewenang, maka otoriter adalah sewenang-wenang. Jika otoritas adalah “kebenaran”, maka otoriter adalah “pembenaran” sehingga otoritarianisme tidak merujuk kepada kualitas otoritatif, akan tetapi justru menunjukkan sikap melebihi otoritas. Maka prasyarat moral, kejujuran dan pengendalian diri, bagi Khaled adalah jalan untuk mengatasi otoritarianisme.¹²

Dalam konteks kehidupan beragama, peran dan otoritas perempuan sering kali menjadi topik yang menarik untuk terus dibahas lebih dalam lagi. Seperti dalam organisasi keislaman IMM yang merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman agama Islam di kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu pertanyaan seputar bagaimana otoritas beragama bagi perempuan dalam IMM pun tak luput dari perhatian masyarakat luas. Sebab dari yang kita ketahui didalam IMM itu sendiri juga terdapat bidang IMMawati yang mana bidang ini berfokus dengan bagaimana meningkatkan peran perempuan dari berbagai aspek kehidupan. ¹³

Otoritas keagamaan bagi perempuan adalah topik penting dan relevan dalam konteks keagamaan dan kesetaraan gender. Dalam banyak tradisi keagamaan, perempuan sering menghadapi batasan dan pembatasan dalam hal partisipasi dan kepemimpinan dalam urusan keagamaan. Namun seiring berjalannya waktu semakin

¹¹ Kunto Wijoyo, *Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

¹² Hamid Fahmy Zarkasyi, *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam* (Jakarta: INSIST, 2021).

¹³ Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: MIUMI dan Pembela Islam Media, 2015).

banyak perubahan yang terjadi di dunia untuk memperluas peran dan otoritas perempuan dalam konteks keagamaan.

Beberapa agama telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan otoritas keagamaan kepada perempuan seperti memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin spiritual, pendeta ataupun ulama. Meskipun di sisi lain masih ada agama-agama yang mempertahankan struktur hierarki yang lebih tradisional, dimana perempuan memiliki akses terbatas terhadap otoritas keagamaan.

Perjuangan untuk kesetaraan gender dalam konteks keagamaan melibatkan diskusi dan perdebatan yang kompleks, melibatkan pertimbangan teologi, budaya, dan social. Banyak organisasi ataupun individu yang telah berkerja untuk mempromosikan inklusi dan kesetaraan gender dalam konteks keagamaan, dengan tujuan menciptakan ruang gerak yang lebih inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi dan memiliki otoritas dalam praktik keagamaan.¹⁴

Urgensi dari isu ini terletak pada pentingnya menciptakan ruang yang inklusif dan adil bagi perempuan dalam praktik keagamaan. Perempuan dalam banyak tradisi keagamaan, perempuan memiliki banyak batasan dan diskriminasi dalam hal partisipasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam urusan keagamaan. Hal ini dapat menghambat potensi perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam komunitas keagamaan dan mempegaruhi kesejateraan perempuan secara keseluruhan. Dengan memberikan otoritas keagamaan kepada perempuan, kita dapat menciptakan kesepakatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam interpretasi teks suci, pengajaran agama dan kepemimpinan spiritual. Hal ini dapat memperkuat pemahaman mengenai kesetaraan gender dan juga memperkaya serta memprluas pengetahuan tentang agama dan spiritual.¹⁵

Pada kesempatan ini kita akan menjelajahi isu mengenai otoritas keagamaan bagi perempuan di IMM, sebagai sebuah organisasi keislaman dibawah naungan muhammadiyah yang berfokus kepada mahasiswa dan organisasi yang didalamnya juga terdapat bidang khusus yang di fokuskan untuk mengoptimalkan peran perempuan baik didalam organisasi maupun diluar organisasi. Otoritas keagamaan dapat diartikan sebagai wewenang ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam konteks keagamaan. Namun bagaimana perempuan di IMM memiliki akses dan pengaruh terhadap otoritas keagamaan?¹⁶

Dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah peran dan otoritas keagamaan bagi perempuan memiliki peran yang penting. Sebagai organisasi yang berbasis islam, dan dibawah naungan Muhammadiyah yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan ruang yang adil bagi perempuan dalam partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

¹⁴ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.

¹⁵ Jarman Arroisi, "Spiritual Healing dalam Tradisi Sufi," *TSAQAFAH* 14, no. 2 (27 November 2018): 323, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2459>.

¹⁶ Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma, "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153-88, <https://doi.org/10.24239/isy.v18i1.876>.

Dalam konteks ini, otoritas keagamaan bagi perempuan di dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah mencakup berbagai aspek seperti pendidikan agama, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman agama melalui program-program pendidikan agama yang diselenggarakan oleh organisasi ini. Selain itu, perempuan juga didorong untuk mengambil peran kepemimpinan didalam organisasi. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus, koordinator, ataupun pemimpin dalam kegiatan keagamaan, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam memajukan organisasi dan masyarakat.¹⁷

Melalui jurnal ini kita akan mencoba memahami bagaimana ikatan mahasiswa muhammadiyah memandang peran perempuan secara lebih dalam lagi dalam konteks keagamaan dan apakah upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam memegang otoritas keagamaan. Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai otoritas keagamaan bagi perempuan dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Seperti apa persepsi ikatan mahasiswa muhammadiyah mengenai perkembangan peran perempuan dalam otoritas keagamaan di IMM, (2) Bagaimana keberadaan otoritas keagamaan perempuan dalam struktur IMM memberikan dampak kepada IMM (3) Bagaimana kontribusi immawati dalam membangun otoritas keagamaan yang responsive gender di IMM. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah otoritas keagamaan bagi perempuan dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran perempuan dalam organisasi keagamaan serta mendorong kesetaraan gender dalam konteks keagamaan yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaknai Perjuangan Perempuan di Lingkungan Tarakan

Perjuangan perempuan di Indonesia mengalami pasang surut, pergantian masa ikut menyertai perjuangan perempuan di wilayah publik, seperti Kartini yang dikenal tegar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pada penjajahan. Perjuangan tersebut tidak hanya melihat perempuan sebagai individu yang terpisah dari lingkungannya, tetapi Kartini memaknai perempuan sebagai bagian dari peradaban, seperti yang dikutip Mursidah "Kecerdasan pikiran penduduk bumiputera tidak akan maju pesat bila perempuan ketinggalan dalam usaha itu, (yaitu) perempuan jadi pembawa peradaban".¹⁸ Peran Kartini membawa angin segar bagi kehidupan perempuan selanjutnya, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan terkait dengan posisi dan peran perempuan di

¹⁷ Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.

¹⁸ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25-62, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.

wilayah publik. salah satu contoh di daerah Kauman yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk eksklusif yang harus dijaga dan diawasi. Salah satu nara sumber yang merupakan salah satu kyai menyampaikan kegelisahan peran perempuan yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah privat. Dia menyampaikan: Aku mbiyen ngerasa'ke pengawasan lan ketertutupan saking garwo kulo selama 25 tahun, kerjane geh teng griyo ngerawat putro (saya dulu meraskan pengawasan dan ketertutupan dari suami selama 25 tahun, kerja di rumah saja merawat anak).¹⁹

Asumsi ontologis dan psikologi menjadi alasan utama dalam mengawasi perempuan, yaitu secara ontologis perempuan diyakini sebagai bagian dari laki-laki, karena perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Keyakinan tersebut, memberikan peluang bahwa perempuan harus tunduk dan patuh terhadap laki-laki, karena laki-laki adalah orang yang memilikinya secara ontologis. Kepatuhan perempuan terhadap laki-laki tidak hanya bersifat sementara dan keluarga tetapi sampai akhir hayat dan bahkan sampai di akhirat. Selama ini, justifikasi keagamaan masih menjadi dominasi untuk menjadi dasar hukum dan membangun budaya patriarki, sehingga apa yang dialami seorang nyai di atas dengan perilaku eksklusifitas dan tidak memberikan peluang atau peran dengan kemampuan yang dimiliki merupakan bagian dari diskriminasi gender. Fenomena yang dialami oleh seorang wanita dalam kehidupannya tentang larangan beraktivitas di luar merupakan percontohan dan menjadi satu pemahaman bagi masyarakat sekitar dari segi etika dan keagamaan. Bahwa perempuan dengan pengetahuan yang baik dan kecapakan agama tidak menjadi jaminan untuk selamat dari budaya patriarki. Menurut Dwi Ratna (2016) salah satu problematika yang muncul di permukaan pesantren termasuk di Kauman Jekulo Kudus terkait dengan ketidakadilan gender ialah karena kajian yang dilakukan berdasarkan penjelasan kitab kuning yang telah mengarah pada budaya patriarki. Pada wilayah yang berbeda, munculnya patriarki berawal dari kuatnya dominasi laki-laki dalam memberikan komentar dan penafsiran pada al Quran, sehingga hampir kitab tafsir yang dikenal dan diajarkan diproduksi oleh laki-laki.²⁰ Realita demikian menimbulkan satu asumsi bahwa kekuasaan laki-laki terhadap perempuan bersifat kekal dan abadi dan hal ini tidak dapat dikritisi karena berangkat dari sumber otoritatif agama yang diyakini kebenarannya. Menurut Muhtador dalam penelitiannya, bahwa kebebasan perempuan ditentukan oleh laki-laki. Kuatnya kuasa laki-laki terhadap perempuan tidak hanya bersifat kekeluargaan, tetapi terkadang melampaui batas kekuatannya, seperti perempuan harus mematuhi pilihan bapaknya dalam berjodoh. Dalam peribahasa dikenal dengan "setali tiga uang" yaitu bahwa adanya masyarakat yang tidak melanjutkan pada pendidikan formal yang lebih tinggi karena kepatuhan penuh atas takdir perjodohan yang ditentukan oleh orang tua laki-laki, seperti yang dialami keluarga dari penjual kelontong di Jekulo Kudus yang suaminya masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga dengan kyai mengungkapkan bahwa tidak pentingnya melanjutkan pendidikan formal sampai jenjang tinggi, cukup SD dan bisa membaca, pada akhirnya akan menikah dan

¹⁹ Syamsuri dkk., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999), 22.

taat pada suami. Femonena ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh keluarga tersebut, tetapi hampir mayoritas satu gang di wilayah J Tarakan, Kalimantan ini mengaplikasikan putus sekolah.²¹

Realitas ini menunjukkan kesamaan antara orang yang berpendidikan tinggi dan tidak harus memenuhi tuntutan dan taat kepada orang tua atau suami yang telah dipikirkan. Menurut Anwar (2016) kesenjangan hubungan dan hilangnya pendidikan dalam keluarga yang bersifat relasi gender memunculkan problematika.²² Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan keluarga yang responsif gender untuk membangun harmoni melalui sumber daya keluarga Ketaatan dan diskriminasi gender dalam memilih pasangan dan beban untuk berpendidikan yang digambarkan satu gang di lingkungan pesantren tersebut bentuk penentangan yang disikapi dengan diam, sehingga dianggap telah menyetujui pilihannya orang tua dalam sistem kehidupan rumah tangga. Begitu juga ketika telah berumah tangga, banyak sumber-sumber otoritatif yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang meninggal dan suaminya tidak ikhlas, perempuan tersebut akan masuk neraka. Argumentasi tersebut bersebaran dan juga digunakan dalam ruang patriarki sebagai alat justifikasi bagi perempuan yang berani mengingkari kekuasaan laki-laki.

Secara psikologis, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah akal dan agamanya. Kelemahaman perempuan secara akal disebabkan faktor persaksian perempuan yang tidak seimbang dengan laki-laki, yaitu dua lawan satu. Begitu juga perempuan dianggap lemah agamanya karena dalam satu bulan perempuan tidak penuh melaksanakan ajaran agama disebabkan haid (Amin, 2003).²³ Kelemahan perempuan dari aspek akal dan agama dalam bahasa agama telah menjerumuskan nasib perempuan pada kegagalan membangun lingkungan yang responsif gender, seperti dilarangnya perempuan shalat di masjid di sekitar Tarakan, Kalimantan, perempuan tidak boleh mengikuti pengajian haul dan perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi dan cukup sekolah dasar. Fenomena demikian diaplikasikan di salah satu pondok di sekitar yang melarang santri untuk mondok ketika melanjutkan pada jenjang tsanawiyah atau SMP, sehingga santri yang ingin mondok harus melepas sekolah sederajat.

Menurut ketua IMM “ Dalam situasi seperti itu, IMM dihadapkan pada peluang yang amat menjanjikan sekaligus tantangan yang cukup berat. Di era digital, banyak inovasi yang dapat dilakukan kaum muda. Namun, pada saat bersamaan, bagi mereka yang punya pola pikir konvensional dan kurang daya kreativitas sangat mungkin akan terpinggirkan dalam persaingan. Sebagai contoh, dalam hal peluang kerja dan karier, dunia kerja semakin dinamis. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pegawai hingga gulung tikar karena dampak digitalisasi maupun pandemi. Sebaliknya, peluang karier justru semakin beragam karena bekerja tak lagi melulu identik dengan kantor dan perusahaan. Self-employed kian menjadi tren anak muda. Hal itu turut didukung fakta bahwa rasio jumlah sarjana per tahun semakin

²¹ Ryan Arief Rahman, “DISKURSUS FENOMENOLOGI AGAMA DALAM STUDI AGAMA-AGAMA,” t.t., 32.

²² Ihwan Mahmudi dkk., “Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom,” t.t., 8.

²³ Amir Reza Kusuma, “Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas,” *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI : 10.15548/alqalb.v13i2.4386>.

tidak berimbang dengan total lowongan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan data Kemendikbud-Ristek (2022), lulusan sarjana per tahun mencapai 1,4 juta, sementara rilis Karirhub Kemenaker (2022) mencatat, total lowongan pekerjaan yang tersedia yaitu sebanyak 141.866. Artinya, hanya 10% peluang kerja dari total sarjana.”²⁴

Untuk menguatkan data, peneliti melakukan wawancara, seberapa besar membahas mengenai bagaimana peran IMM dalam kesetaraan gender di lingkungan organisasi ataupun di luar organisasi. Bagaimana peran perempuan didalam IMM itu sendiri apakah memiliki kebebasan dalam hal keagamaan atau adakah perbedaan dalam hal kepemimpinan atau lainnya. Jurnal ini lebih menekankan dari sisi keagamaan bagi perempuan di IMM.

Biodata Narasumber²⁵

Nama Lengkap : Sunarti L

Riwayat Jabatan di IMM : Ketua Bid. IMMawati DPD IMM Kalimantan Utara

Seperti apa persepsi organisasi mengenai perkembangan peran perempuan dalam otoritas keagamaan di IMM?

IMM sangat memberikan kebebasan kepada perempuan, baik dalam hal menyuarkan aspirasinya baik dari segi keagamaan, intelektual maupun humanitas/sosial, selain itu mereka juga diberikan hak yang sama dari sisi kepemimpinan, mereka bisa menjabat baik menjadi ketua, sekretaris, bendahara atau ketua bidang dstny baik dari tingkat pikom hingga pusat.

Bagaimana keberadaan otoritas keagamaan perempuan dalam struktur IMM memberikan dampak kepada organisasi?²⁶

Di IMM memiliki bidang khusus perempuan yaitu Bidang IMMawati, jadi distruktural IMM tidak akan lepas dari perempuan. Berbicara mengenai dampak, tentu perempuan memiliki dampak terhadap organisasi. Contoh ketika dalam pengambilan keputusan, kita sering mendengar bahwa laki-laki mengambil keputusan dengan akal sedangkan perempuan mengambil keputusan dengan hati, ketika keduanya digabung maka justru ini akan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Selain itu, adanya bid IMMawati, perhatian IMM terhadap isu-isu keperempuanan akan semakin besar. Ini akan mempengaruhi program kerja yg akan dilakukan IMM.

Bagaimana kontribusi IMMawati dalam membangun otoritas keagamaan yang responsive gender didalam IMM?

Kontribusinya tentu beragam tergantung apakah ditingkat pikom, cabang, dsbnya. selain itu wilayah juga mempengaruhi. Mengenai gender kadang disinggung dari segi kepemimpinan. Seperti yang sy jawab dino.1 IMM sangat memberikan kebebasan perempuan selama mereka mampu dan sanggup menjalankan amanahnya.

²⁴ Wawancara dengan ketua IMM Tarakan

²⁵ Wawancara dengan ketua Sunarti L Ketua Bid. IMMawati DPD IMM Kalimantan Utara

²⁶ Wawancara dengan ketua Sunarti L Ketua Bid. IMMawati DPD IMM Kalimantan Utara

Selanjutnya, diberikan hak suara yang sama. Contoh perempuan boleh mencalonkan diri atau mengusulkan seseorang pada saat musyawarah. Mereka punya hak berpendapat di rapat maupun forum-forum resmi di kegiatan IMM. Mereka diberikan kebebasan untuk berkarya. Salah satu pengalaman sy, yaitu diberikan kesempatan untuk mengelola majalah “Suara IMMawati”.

Kontribusi lainnya pada pelaksanaan program semua anggota diwajibkan hadir dalam kegiatan tersebut. Contoh ketika ada kegiatan Pendidikan Khusus IMMawati (Dikuswati), peserta pada kegiatan tersebut hanya IMMawati dan panitianya IMMawan.²⁷

Jadi, di IMM perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagaimana otoritas keagamaan perempuan di IMM khususnya di Kota Tarakan? apakah ada kendala ataupun masalah dalam hal tersebut?

Tentu ada, dikarenakan di Tarakan IMM sendiri merupakan ortom minoritas maksudnya ortom yang minim kader. Dikarenakan rata-rata IMMawati yang bertahan hingga saat ini merupakan kader-kader muda dibandingkan dengan kader IMMawan. Hanya beberapa immawati yang bisa menyuarakan aspirasinya.²⁸

Situasi itu harus benar-benar disadari generasi muda, termasuk mahasiswa, yang di masa depan akan berhadapan langsung dengan fenomena tersebut. IMM sebagai pengader utama generasi muda Muhammadiyah di lingkungan perguruan tinggi pun harus kian inovatif dalam melakukan pembangunan kapasitas (capacity building) para anggotanya. Para aktivis IMM harus semakin lihai memainkan perannya di era digital. Di tengah upaya merespons tantangan besar tersebut, IMM juga memiliki tuntutan untuk tetap menjaga muruahnya sebagai gerakan intelektual, sekaligus elemen masyarakat sipil (civil society) yang menjadi penyeimbang negara. Dengan demikian, generasi muda Muhammadiyah harus sigap menghadapi kehidupan yang kian pragmatis, dengan tetap menjaga idealisme dan prinsip-prinsip gerakannya. Untuk mewujudkan hal itu, IMM perlu menyeimbangkan tiga pilar gerakannya, yaitu gerakan intelektual, gerakan ekonomi, dan gerakan politik agar dapat menjadi modal sosial yang berharga, tak hanya bagi Muhammadiyah, tetapi juga bagi bangsa ini. Pilar pertama, yaitu gerakan intelektual merupakan fondasi utama IMM sebagai organisasi yang para anggotanya lahir dan tumbuh di lingkungan perguruan tinggi. Terlebih, Muhammadiyah dikenal salah satunya lantaran keunggulannya di bidang pendidikan.

Karena itu, IMM harus menjadi penggerak bagi para mahasiswa dan kaum muda Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas kesarjanaannya agar berguna bagi bangsa ini di masa depan. Salah satu model gerakan yang perlu dibangun IMM ialah dengan mempersiapkan para kadernya agar dapat melanjutkan studi di kampus-kampus terbaik di dunia. Bagaimanapun pendidikan ialah investasi terbaik. Di masa yang akan datang, kader-kader terbaik itu akan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini.

²⁷ Wawancara dengan ketua Sunarti L Ketua Bid. IMMawati DPD IMM Kalimantan Utara

²⁸ Wawancara dengan ketua Sunarti L Ketua Bid. IMMawati DPD IMM Kalimantan Utara

Pilar kedua, yaitu gerakan ekonomi. Perkembangan era digital merupakan kesempatan yang amat menjanjikan bagi dunia usaha karena di saat peluang kerja di perkantoran kian terbatas, peluang usaha justru menjadi semakin luas dan tak terbatas. Hal itu dapat menjadi ruang bagi gerakan IMM dengan mendidik para mahasiswa, agar siap menjadi entrepreneur muda demi tonggaknya basis perekonomian masyarakat. Tradisi amal usaha di Muhammadiyah yang didasari literasi finansial yang baik, perlu menjadi pembelajaran penting bagi mahasiswa.²⁹Ke depan, akan semakin banyak potensi ekonomi baru seiring dengan perkembangan gaya hidup maupun peningkatan jumlah penduduk. Berbekal pelatihan, pendampingan, dan jaringan yang memadai, IMM diharapkan dapat menjadi medium bagi kader-kader yang ingin terjun ke dunia usaha.

Baru-baru ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak IMM untuk berkolaborasi membangun 1.000 warung atau minimarket yang diinisiasi kaum muda. Zulkifli meyakini gerakan itu dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan. Pilar ketiga, yaitu gerakan politik. Bagaimanapun, sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, IMM perlu terlibat aktif dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Pada dasarnya, politik bermakna kebijakan, siasat, pemerintahan negara, dan kewarganegaraan. Dalam konteks itu, IMM bersama organisasi mahasiswa yang lain dapat menjadi penyeimbang negara dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan partisipasi publik. Untuk itu, IMM juga bertugas mendidik kader-kadernya agar tidak buta politik. Bahkan, dengan jaringan yang dimilikinya, IMM dapat mempersiapkan anak-anak muda potensial untuk masuk dunia politik. Di satu sisi, IMM harus tetap kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah, di sisi lain IMM harus siap jika kader-kader terbaiknya diminta berkhidmat dalam politik pemerintahan

KESIMPULAN

Dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah peran dan otoritas keagamaan bagi perempuan memiliki peran yang penting. Sebagai organisasi yang berbasis islam, dan dibawah naungan Muhammadiyah yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan ruang yang adil bagi perempuan dalam partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

Dalam konteks ini, otoritas keagamaan bagi perempuan di dalam ikatan mahasiswa muhammadiyah mencakup berbagai aspek seperti pendidikan agama, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Perempuan diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman agama melalui program-program pendidikan agama yang diselenggarakan oleh organisasi ini. Selain itu, perempuan juga didorong untuk mengambil peran kepemimpinan didalam organisasi. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus, koordinator, ataupun pemimpin dalam kegiatan keagamaan, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam memajukan organisasi dan masyarakat, di Tarakan IMM sangat berpengaruh dalam membangun peradaban Ke depan, akan

²⁹ Mohammad Zakki Azani dan Khalif Muammar A. Harris, "Islam dan Modernisme di Indonesia: Tinjauan atas Pemikiran Mohamad Rasjidi (1915-2001)," *TSAQAFAH* 15, no. 1 (30 April 2019): 165, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.2831>.

semakin banyak potensi ekonomi baru seiring dengan perkembangan gaya hidup maupun peningkatan jumlah penduduk. Berbekal pelatihan, pendampingan, dan jaringan yang memadai, IMM diharapkan dapat menjadi medium bagi kader-kader yang ingin terjun ke dunia usaha. Terlebih, baru-baru ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak IMM untuk berkolaborasi membangun 1.000 warung atau minimarket yang diinisiasi kaum muda. Zulkifli meyakini gerakan itu dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan. Pilar ketiga, yaitu gerakan politik.

REFERENSI

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumudin*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.
- Arroisi, Jarman. "Spiritual Healing dalam Tradisi Sufi." *TSAQAFAH* 14, no. 2 (27 November 2018): 323. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2459>.
- Azani, Mohammad Zakki, dan Khalif Muammar A. Harris. "Islam dan Modernisme di Indonesia: Tinjauan atas Pemikiran Mohamad Rasjidi (1915-2001)." *TSAQAFAH* 15, no. 1 (30 April 2019): 165. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v15i1.2831>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Husaini, Adian. *Mengapa Barat Menjadi Sekuler-Liberal*. Ponorogo: CIOS, 2007.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Jeje Zaenudin. *Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: MIUMI dan Pembela Islam Media, 2015.
- Khaled, Amgad S. D., Najat Shakir Mahmood, dan Fozi Ali Belhaj. "Islamic Human Resource Management in Gulf Countries: A Literature Review." *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS* 20 (28 Februari 2023): 514–25. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.47>.
- Kunto Wijoyo. *Islam Sebagai Ilmu, Epistimologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Mahmudi, Ihwan, Muh Zidni Athoillah, Eko Bowo Wicaksono, dan Amir Reza Kusuma. "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," t.t., 8.
- Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New York: Dodo Press, 2009.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Rahman, Ryan Arief. "DISKURSUS FENOMENOLOGI AGAMA DALAM STUDI AGAMA-AGAMA," t.t., 32.
- Syamsuri, Hanif Fadillah Nirhamna, Amir Reza Kusuma, dan Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972.
- Wan Mohd Nor Wan Daud. *Budaya Ilmu: Makna dan Manifestasi dalam Sejarah dan Masa Kini*. Malaysia: Dewan Bahasa & Pustaka Kuala Lumpur, 1997.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Agama Dalam Pemikiran Barat Modern dan Post-Modern*. 1 ed. Vol. 4. Jakarta: ISLAMIA, 2005.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam*. Jakarta: INSIST, 2021.